

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**

No	Komponen	Rencana Kegiatan	Keterangan Pelaksanaan	Waktu	Rencana Tindak Lanjut
1	Manajemen Perubahan				
	Tim Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dibentuk	Januari	Melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap anggota tim
	Road Map Reformasi Birokrasi	Penyusunan Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada unit kerja	Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi telah disusun	Februari	Menjalankan rencana kerja dan melakukan movev
		Pelaksanaan sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana kerja Reformasi Birokrasi	Sosialisasi Road Map telah dilaksanakan	Februari	Melakukan monitoring internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi pada setiap pegawai
	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala	Juni	-
		Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas hasil monitoring dan evaluasi	RATL belum sepenuhnya dilaksanakan	Juni	RATL tahun 2022 penilaian semester pertama akan dilaksanakan pada semester kedua
	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	Pelibatan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pimpinan terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Januari - Juni	-
		Pemilihan Agen Perubahan dan role model lingkup unit kerja	Agen Perubahan dan Role Model lingkup unit kerja telah dipilih	Februari	-
2	Deregulasi Kebijakan				
	Harmonisasi	Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis	Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang kurang relevan	Maret & April	Melakukan komunikasi dari hasil identifikasi peraturan perundang-undangan kepada stakeholder terkait
		Pelaksanaan revisi/menghapus peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis	Telah dilakukan revisi Peraturan Bupati yang kurang relevan	Juni	Melakukan komunikasi dari hasil revisi peraturan perundang-undangan kepada stakeholder terkait
3	Penataan dan Penguatan Organisasi				
	Evaluasi Kelembagaan	Evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Juni	Mengajukan pengusulan hasil evaluasi kelembagaan kepada stakeholder terkait
		Evaluasi pengukuran jenjang organisasi	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	Juni	Mengajukan pengusulan hasil evaluasi kelembagaan kepada stakeholder terkait
		Evaluasi kemungkinan duplikasi fungsi	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	Juni	Mengajukan pengusulan hasil evaluasi kelembagaan kepada stakeholder terkait
		Evaluasi kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	Juni	Mengajukan pengusulan hasil evaluasi kelembagaan kepada stakeholder terkait
		Evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya	Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya	Juni	Mengajukan pengusulan hasil evaluasi kelembagaan kepada stakeholder terkait
		Analisis rentang kendali terhadap struktur yang berada langsung di bawahnya	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya	Juni	Mengajukan pengusulan hasil evaluasi kelembagaan kepada stakeholder terkait
		Analisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan	Juni	Mengajukan pengusulan hasil evaluasi kelembagaan kepada stakeholder terkait
		Evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan	Juni	Mengajukan pengusulan hasil evaluasi kelembagaan kepada stakeholder terkait
		Analisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain	Juni	Mengajukan pengusulan hasil evaluasi kelembagaan kepada stakeholder terkait

		Analisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Juni	Mengajukan pengusulan hasil evaluasi kelembagaan kepada stakeholder terkait
	Tindak Lanjut Evaluasi	Pengajuan perubahan organisasi berdasarkan hasil evaluasi	Telah dilaksanakan pengajuan perubahan organisasi berdasarkan hasil evaluasi	-	Melaksanakan hasil perubahan organisasi berdasarkan persetujuan oleh instansi
		Penyederhanaan birokrasi berdasarkan hasil evaluasi	Sudah dilaksanakan sebagian	-	
4	Penataan Tata Laksana				
	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	Penyusunan peta proses bisnis	Telah dibuat peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Januari - Februari	Melakukan evaluasi berkala terhadap peta proses bisnis yang telah dibuat
		Penjabaran peta proses bisnis ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	Telah dibuat SOP terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, SOP kegiatan yang telah disesuaikan dengan peta proses bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Januari - Februari	Menginternalisasikan prosedur tetap dalam setiap proses bisnis yang ada
		Penerapan prosedur operasional tetap (SOP)	Telah diterapkan SOP terkait penyelenggaraan TUSI di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Maret - Juni	Melakukan evaluasi berkala terhadap peta proses bisnis/SOP yang telah dilaksanakan
		Evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan SOP dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi	Telah dilaksanakan evaluasi dan tidak ada penyesuaian peta proses bisnis	Juni	-
	Keterbukaan Informasi Publik	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Telah diterapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui publikasi di beberapa kanal media sosial dan website	Maret - Juni	Melakukan update secara berkala untuk meningkatkan kualitas informasi dan media
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Juni	-
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja	Telah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan unit kerja	Februari	-
		Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Maret	-
	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Februari	Mendorong pegawai untuk aktif mengikuti kegiatan/webinar berbasis pengembangan kompetensi
		Pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan	Telah dilakukan pengembangan kompetensi untuk sumber daya aparatur di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	April	-
	Penetapan kinerja individu	Penerapan penetapan kinerja individu	Telah diterapkan penetapan kinerja individu melalui perjanjian kerja	Januari	-
		Penilaian kinerja individu	Telah dilakukan penilaian kinerja individu berdasarkan perjanjian kerja	Februari - Juni	-
		Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Juni	-
	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Telah diterapkan aturan disiplin jam kerja masuk dan pulang pegawai	Februari	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aturan disiplin yang telah dibuat
		Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin	Telah dilakukan monev secara berkala atas pelaksanaan aturan disiplin	Juni	
	Pelaksanaan evaluasi jabatan	Implementasi standar kompetensi jabatan (SKJ)	Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Februari - Juni	Melakukan pelaporan secara berkala melalui sistem yang ada
		Evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Juni	
	Sistem Informasi Kepegawaian	Maintenance sistem informasi kepegawaian	Telah dilakukan maintenance secara berkala sistem informasi kepegawaian	Maret, Juni	Melakukan sosialisasi sistem informasi kepegawaian kepada pegawai baru
6	Penguatan Akuntabilitas				
	Keterlibatan Pimpinan	Pelibatan pimpinan unit kerja dalam penyusunan Renja	Pimpinan telah terlibat aktif dalam penyusunan Renja organisasi	Februari - Mei	-

	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kapasitas SDM terkait SAKIP	Pegawai penanggung jawab SAKIP telah mengikuti Bimtek	April	-
		Pemutakhiran data kinerja secara berkala	Telah dilakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala melalui sistem pelaporan SIERKEL dan ELSA	Maret, Juni	
7	Penguatan Pengawasan				
	Gratifikasi	Melaksanakan public campaign	Telah dilaksanakan public campaign melalui sosialisasi di media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	April	Melakukan penanganan gratifikasi secara intens
		Implementasi penanganan gratifikasi	Telah diimplementasikan penanganan gratifikasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mei - Juni	-
		Evaluasi atas kebijakan penanganan	Telah dilaksanakan evaluasi atas kebijakan penanganan	Juni	Melakukan tindak lanjut atas kebijakan penanganan gratifikasi
		Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi	Telah dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi	Juni	-
	Penerapan SPIP	Identifikasi lingkungan pengendalian	Telah dilakukan identifikasi lingkungan pengendalian	Februari	Melakukan evaluasi atas penanganan risiko sejalan dengan perkembangan risiko yang ada
		Penilaian risiko unit kerja	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja	Februari	Melakukan koordinasi kepada masing-masing bidang untuk menyusun rencana tindak pengendalian
		Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Telah dilaksanakan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Maret - Juni	-
		Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Telah dilaksanakan sosialisasi SPI melalui media grup WhatsApp pegawai	Maret	-
		Pemantauan pengendalian intern	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	Juni	
		Evaluasi atas penerapan SPI	Belum dilaksanakan	-	Evaluasi Penerapan SPI akan dilaksanakan pada bulan Juli
	Pengaduan Masyarakat	Tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Maret	Melakukan peningkatan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
		Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	April	Menerima pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi melalui website LAPOR
		Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	April	-
	Whistle-Blowing System	Sosialisasi Whistle Blowing System	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	Mei	Melakukan monitoring melalui website lapor WBS dan evaluasi pelaksanaan kebijakan WBS
	Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi penangan benturan kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	Juni	
		Impelementasi penangan benturan kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	-	
		Evaluasi dan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan dan hasil telah ditindaklanjuti	-	
	Pembangunan Zona Integritas	Pencanangan pembangunan zona integritas	Belum dilaksanakan	-	
		Pembangunan zona integritas	Belum dilaksanakan	-	
		Evaluasi atas pembangunan zona integritas	Belum dilaksanakan	-	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
	Standar Pelayanan	Pembuatan kebijakan standar pelayanan	Telah dibuat kebijakan standar pelayanan	Januari - Februari	Melakukan sosialisasi kepada pihak potensial pengguna pelayanan

		Review dan perbaikan atas standar pelayanan	Telah dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan	Juni	-
Budaya Pelayanan Prima		Peningkatan kemampuan/kompetensi untuk menunjang penerapan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan peningkatan kemampuan/kompetensi untuk menunjang penerapan budaya pelayanan prima	Maret	-
		Sosialisasi pelayanan pada berbagai media	Sosialisasi telah dilakukan melalui media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	April, Juni	-
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan money secara berkala atas pelaksanaan budaya pelayanan prima	Juni	-
Pengelolaan Pengaduan		Pembuatan media pengaduan dan konsultasi pelayanan	Telah dibuat media pengaduan melalui website dan media sosial	April	Menindaklanjuti pengaduan dan meningkatkan pelayanan
		Pembentukan unit khusus pengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Unit khusus pengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan telah dibentuk	Februari-Maret	
		Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan	Pengaduan telah ditindaklanjuti	Mei	
		Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dankonsultasi	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan yang ada	Juni	
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan		Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Belum dilaksanakan	-	Survei Kepuasan Masyarakat akan dilaksanakan pada akhir periode/tahun
		Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat	-	-	
		Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	-	-	
Pemanfaatan Teknologi Informasi		Penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Telah dilaksanakan upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan laporan kinerja (SIERKEL dan ELSA)	Maret	Melakukan perbaikan sistem secara berkala
		Perbaikan sistem informasi secara berkala	Telah dilakukan perbaikan sistem informasi (SIERKEL dan ELSA) secara berkala	Juni	

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN



KHUSNUL YAQIN, S.Si
NIP. 196705241993021004